

ABSTRAKS

Dini Siti Mardiah: “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2018”

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dijelaskan bahwa salah satu tujuan adanya otonomi daerah yaitu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Hal ini juga didukung oleh UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Konsep ini berlaku untuk setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Subang. Kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Subang terhitung cukup rendah, begitupun juga dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Subang. Sehingga dapat dikatakan ketergantungan pemerintah Kabupaten Subang terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang secara parsial. Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang secara simultan.

Teori yang digunakan yaitu menurut Abdul Halim yang mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, yaitu untuk melihat hubungan antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Sumber data yang digunakan yaitu berupa data dari Laporan Keuangan Kabupaten Subang selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2009-2018, yang diperoleh langsung dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode uji regresi sederhana, berganda, dan uji asumsi klasik.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Subang dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.109 > 2.306$). Sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.818 < 2.306$). Sedangkan, hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Subang dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($28.769 > 4.740$).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

Dini Siti Mardiah: "Affecting Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence of Subang Regency in 2009-2018"

Law number 9 of 2015 concerning regional autonomy explained that one of the objectives of regional autonomy is the central government's efforts to accelerate development and economic growth in each region. This is also supported by Law number. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (PDRB) which are expected to be one source of government revenue and income in increasing regional financial independence. This concept applies to every district and city in Indonesia including Subang Regency. The financial independence of the Subang Regency region is calculated to be quite low, even with the contribution of regional taxes and retributions in the Subang Regency. So that it can be said that the dependence of the Subang Regency government on the central government is still quite high.

This research aims to determine the effect of regional taxes and local user fees on the financial independence of the Subang Regency partially. In addition, it is also to determine the effect of regional taxes and local user fees on the financial independence of the Subang Regency simultaneously.

The theory used is according to Abdul Halim who argues that regional financial independence is shown by the size of the PAD compared to regional revenues sourced from other sources. The higher the financial autonomy ratio of the regions, the higher the community participation in paying regional taxes and retributions which are the main components of PAD. The higher paying regional taxes and levies illustrates that the level of community welfare is getting higher.

The research method used is a quantitative associative approach, namely to see the relationship between the variables of regional tax and regional retribution on regional financial independence. The data source used is in the form of data from the Subang Regency Financial Report for the last 10 years, namely in the year 2009-2018, which was obtained directly from the Regional Financial and Asset Agency Subang Regency. The data obtained were analyzed by multiple regression analysis and classical assumption

Based on the results of this study indicate that the regional tax partially has a significant effect on the financial independence of the Subang Regency with a value of $t_{\text{arithmetic}} > t_{\text{table}}$ ($8,109 > 2,306$). While partial regional retribution did not have a significant influence on the financial independence of the Subang Regency with a t value $< t_{\text{table}}$ ($-0.818 < 2,306$). Meanwhile, the results of regional taxes and regional levies simultaneously have a significant influence on the financial independence of the Subang Regency with a value of $f_{\text{arithmetic}} > f_{\text{table}}$ ($28,769 > 4,740$).

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Financial Independence